



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : PLN KANTOR PUSAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SAPTO AJI NUGROHO
2. Jabatan : EXECUTIVE VICE PRESIDENT PENGEMBANGAN BISNIS KORPORAT DAN INVESTASI
3. NHK : 405034

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 4.372.006.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 153 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA CILEGON , HASIL SENDIRI Rp. 454.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/221 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.887.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 475 m2/298.23 m2 di KAB / KOTA KOTA CILEGON , HASIL SENDIRI Rp. 1.111.000.000
4. Tanah Seluas 2254 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 20.006.000
5. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 875.500.000**

1. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 10.500.000
2. MOBIL, TOYOTA AGYA SEDAN Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 295.000.000
4. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 513.058.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**



| | | |
|-----------------------------------|-----|---------------|
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 2.348.579.808 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | 216.000.003 |
| Sub Total | Rp. | 8.325.143.811 |
| III. HUTANG | Rp. | 252.000.000 |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 8.073.143.811 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.